

BAB V

PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

A. Operasi DI/TII di Sulawesi dan Jawa Barat

Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang biasa dikenal dengan sebutan DI/TII merupakan gerakan separatisme yang menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. DI/TII memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 7 Agustus 1949 dengan Negara Islam Indonesia sebagai negara yang diproklamasikan. Panglima tertinggi Negara Islam Indonesia adalah S. M. Kartosuwurjo dengan daerah di Priangan dan 1 Resimen pasukan bersenjata di bawah pimpinan Oni Qital.¹

Setelah proklamasi secara sepahik yang dilakukan oleh DI/TII, mereka mengklaim wilayah Negara Islam Indonesia meliputi Jawa Barat yang dipimpin oleh Panglima Divisi I Agus Abdulah, Jawa Tengah dengan Panglima Mugni, Indonesia Timur yang dipimpin oleh Panglima Divisi IV Kahar Muzakar, serta Jawa Timur, Kalimantan, dan Sumatera yang sedang dalam proses.² Dalam perkembangannya, DI/TII merupakan gerakan separatisme yang menginginkan pembentukan kedaulatan sendiri dari Indonesia dan berlandaskan hukum Islam didalamnya. Oleh karena itu DI/TII tidak sesuai dengan cita-cita Pancasila dan Proklamasi Indonesia, sehingga DI/TII dianggap sebagai gerakan separatisme yang

¹ Marzuki Arifin. *Negara Islam Indonesia (Darul Islam)*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia. 1949, hlm. 29.

² *Ibid.*

harus dihilangkan melalui jalur politik dan militer, dilancarkanlah operasi untuk menumpas DI/TII di seluruh Indonesia.

DI/TII di Sulawesi merupakan lanjutan dari DI/TII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Sedangkan di Sulawesi, DI/TII dipimpin oleh Kahar Muzakar karena Kahar Muzakar merupakan Panglima yang ditugaskan untuk wilayah Indonesia Timur. Di daerah Enrekang pada tanggal 3 April 1959, di daerah Padukhu Kepala Kepolisian daerah setempat dihadang oleh gerombolan DI/TII. Dalam insiden ini, tiga kompi dari gerombolan DI/TII dapat dipukul mundur oleh pasukan Polri dengan adanya bantuan dari Pare-pare.

Dalam Operasi KILAT di Mamuju pantai sebelah barat Sulawesi pada tanggal 17 Desember 1962, Batalyon 952 Resimen IX Brigade Mobil di bawah pimpinan I.P. I. HM. Dumalang dalam gerakan Operasi yang dikenal dengan Operasi CATUR PRASETYA telah berhasil merebut pusat kedudukan DI/TII yang dipimpin oleh Mayor DI/TII A.G. Sakti. Dalam operasi ini, sembilan orang anggota gerombolan tewas dan 84 orang anggota beserta senjatanya ditawan. Selain itu pasukan dapat merampas sebuah mesin diesel, sebuah agregat, dan tiga kapal masing-masing beratnya 30 ton. Sementara itu di Boepiman, Sulawesi Tenggara dalam operasi yang melibatkan Batalyon 924 Resimen Brigade Mobil di bawah pimpinan AKP M.Sjukur berhasil melumpuhkan kekuatan DI/TII dan menawan 1409 orang anggota DI/TII.³

³Memet Tanumidjaja. *Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI. 1971, hlm.135.

Tanggal 5 April 1964 Pglima Kodam XIV Hasanudin Kolonel M. Yusuf mengadakan inspeksi di daerah Pinrang. Dalam inspeksi ini M. Yusuf didampingi oleh pejabat Kepolisian lainnya yaitu Kombes Pol. Drs. Marjaman dari Depak, AKBP R.M Subono Syamsi yang mewakili Kepala Komisariat Sulawesi, KP. II. W.F. Taroreh yang merupakan staf Asisten II Komdak XVIII Sulawesi, dan beberapa perwira Angkatan Darat Lainnya.⁴ Mereka mencari dan mengejar bekas Letkol Andi Selle Matolla dan rombongannya karena telah mengkhianati M. Yusuf. Dalam inspeksi ini kontak senjata tidak dapat dihindari. Akibat pengkhianatan Andi Selle tersebut menewaskan dua perwira TNI sedangkan Kombes Marjaman mengalami luka-luka. Rombongan Andi Selle berhasil dilumpuhkan meskipun Andi Selle berhasil meloloskan diri. Akan tetapi pasukan M. Yusuf dapat diselamatkan meskipun Kombes Marjaman menderita luka-luka.

Salah satu Kompi Brimob yang ikut serta dalam Operasi KILAT yang menumpas DI/TII di Sulawesi adalah Kompi Pelopor pimpinan IP. II Kusnan Arif. Pasukan Brimob ini berhasil melucuti senjata dari gerombolan Andi Selle lainnya di Cakke dan Kalasi. Andi Selle dapat ditembak mati oleh anggota Resmob dari Mabak yaitu Brigpol Muljadi di daerah Pinrang. Selain operasi yang berhasil menembak mati Andi Selle, pada tanggal 2 Februari 1965 Pleton Yon 330 Kujang/Siliwangi pimpinan Peltu Umar berhasil menemukan jejak Kahar Muzakar.⁵ Kahar Muzakar bersama dengan pasukannya ditemukan di tepi selatan sungai Lasol.

⁴ *Ibid.*

⁵ Awaloedin Djamin. *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti POLRI. 2007, hlm. 362.

Pada tanggal 3 Februari pasukan Peltu Umar dapat menembak mati Kahar Muzakar dan menangkap pasukan yang tersisa. Dengan kematian Kahar Muzakar, maka gerombolan DI/TII di Sulawesi dapat ditumpas dan Sulawesi dapat dikendalikan kembali.

Sejak tahun 1960 Kodam VI/Siliwangi telah mengeluarkan perintah untuk melakukan operasi-operasi militer guna menumpaskan DI/TII di daerah-daerah yang dijadikan pusat DI/TII di Jawa Barat. Operasi-operasi dilakukan oleh semua unsur ABRI, Angkatan Darat dan Angkatan Kepolisian serta semua rakyat dari berbagai lapisan yang tergabung dalam Organisasi Pertahanan Rakyat yang dikenal dengan sebutan “Pagar Betis”.⁶ Operasi ini bertujuan mengepung pusat-pusat yang dijadikan markas DI/TII erta menghancurkan dan membersihkan sisa-sisa pengaruh dari DI/TII. Operasi-operasi ini dilakukan di daerah Kodim Bandung yaitu utara Ujungberung, Ciwidoy, Ciparay, Majalaya, Garut, dan Banjaran.

Dalam operasi penumpasan DI/TII di Jawa Barat, Kepolisian Negara mengerahkan sekitar 326 Kompi gabungan baik Brimob, Perintis, dan Polisi Umum. Operasi-operasi penumpasan DI/TII ditingkatkan dengan Doktrin Perang Wilayah karena pimpinan DI/TII Kartosuwiryo belum juga tertangkap. Selain operasi Pagar Betis, dilakukan juga operasi Bharatayuda dan operasi Pamungkas. Operasi Bharatayuda dilakukan oleh satuan Kodam Siliwangi, Kodam Diponegoro, Kodam Brawijaya, dan Brigade Mobil Polri beserta rakyat. Untuk mengimbangi kekuatan dari satuan gabungan yang dilakukan untuk menumpas DI/TII, DI/TII melakukan

⁶ Memet Tanuwidjaja, *op.cit*, hlm. 136.

tindakan yang mengakibatkan keresahan yang terjadi pada rakyat. Mereka melakukan terror dan pembunuhan terhadap warga yang tidak membantu DI/TI. Sehingga hal itu mengakibatkan pembakaran dan penjarahan terhadap rumah-rumah warga.

Di Kabupaten Subang, Polisi yang berada di Pos Polisi Cisalak menerima laporan dari masyarakat bahwa terjadi keributan di kampung Ujung Sawah. Menindaki laporan dari masyarakat tersebut, agen Polisi Oman beserta anak buahnya segera menuju lokasi kejadian dengan menggunakan senjata lengkap dan dibantu oleh Organisasi Kemanan Desa (OKD) dan meninggalkan lima orang di pos Polisi Cisalak . Ternyata laporan dari masyarakat tersebut palsu dan tidak ditemukan apa-apa di lokasi dan rombongan Oman memutuskan untuk kembali ke Pos Polisi Cisalak. Sesampainya di Po Polisi Cisalak, ternyata Pos Polisi tersebut sudah dikuasai oleh pemberontak DI/TII dan terjadi kontak senjata antara pemberontak dan rombongan Oman. Dalam kontak senjata tersebut, AP. I Suhardi, AP. II. Karsip dan seorang anggota OKD tewas tertembak oleh rombongan pemberontak.

Pada tahun 1960, Kompi 5995 Ranger Brimob dibawah pimpinan AKP Anton Soedjarwo melakukan tugas operasi di Garut Selatan dan berhasil melakukan tekanan-tekanan terhadap pemberontak.⁷ Pasukan ini berhasil menangkap 47 orang anggota DI/TII. Namun pasukan ini mengalami kesulitan karena masyarakat yang berada di daerah tersebut bersimpati kepada pemberontak. Sehingga jika mereka menjumpai patrol yang dilakukan oleh Polisi, penduduk memberikan kode untuk

⁷ Awaloedin Djamin, *op.cit*, hlm. 327.

pemberontak dengan menumbuk padi di lesung. Dengan kode itu, pemberontak bisa menghindari patrol dari pasukan Ranger Brimob.

Sejak 1 April 1962 operasi penghancuran telah dilakukan untuk menumpas DI/TII di Jawa Barat. Operasi penghancuran dicanangkan oleh ABRI dengan menggelar operasi Bharatayuda I dan II. Dalam operasi Bharatayuda I berhasil ditangkap 1.608 anggota DI/TII hidup maupun mati. Empat senjata bren, tujuh sten, 27 senapan, dan sembilan pucuk pistol disita. Pasukan Brimob Polri yang tergabung dalam operasi ini adalah Yon 208 pimpinan KP Mursaid, kompi-kompi Brimob Jawa Barat dan kompi-kompi komando cadangan serta Polisi Umum. dalam operasi Bharatayuda II, sebanyak 3278 orang anggota DI/TII ditahan, menyerah, dan mati. Adapun senjata yang disita adalah 9 bren, 4 montir, 19 granat, 34 sten, 56 senapan, 15 pistol, dan sebuah LMG.⁸

Pada bulan Juni 1962 terdengar berita bahwa gerombolan DI/TII Kartosuwiryo melakukan penggarongan di desa di kecamatan Pacet. Menanggapi berita tersebut, dibentuklah operasi yang disebut operasi Pamungkas. Dalam operasi ini dilakukan oleh Yon 2061 Siliwangi. Pasukan ini kemudian melakukan pengejaran. Setelah berjalan dua hari, pasukan tersebut menemukan sarang gerombolan DI/TII di puncak gunung Geger. Pengepungan yang dilakukan pasukan ABRI tersebut, pihak gerombolan kemudian menyerahkan diri. Dalam pengepungan tersebut, S.M. Kartosuwiryo yang merupakan Panglima atau Ulama Negara Islam

⁸ *Ibid*, hlm. 328.

Indonesia tertangkap. Tertangkapnya Kartosuwiryo mengakibatkan selesainya pemberontakan besar DI/TII yang terjadi di Jawa Barat.

B. Operasi Trikora

Berdasarkan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945, wilayah Negara Republik Indonesia meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda yang terdiri dari delapan propinsi. Salah satu propinsi tersebut adalah Maluku dengan Irian Barat yang ada didalamnya. Namun hasil konfrensi Denpasar yang diselenggarakan oleh Dr. H. J. Van Mook pada 7-23 Desember 1946⁹ menghasilkan keputusan bahwa berdirinya Negara Indonesia Timur yang meliputi bekas wilayah timur besar kecuali Irian Barat. Menurut Van Mook, Irian Barat juga akan menjadi bagian dari wilayah NIT yang akan diatur kemudian. Akan tetapi pernyataan Van Mook tersebut dikecam oleh pemerintah Belanda karena menurut pemerintah Belanda, Nieuw Guinea yang merupakan wilayah Hindia Belanda adalah milik Kerajaan Belanda. Namun pimpinan sidang yang bernama Ide Anak Agung Gede tetap menuntut masuknya Irian Barat dalam wilayah Indonesia, jika tidak maka ia akan meninggalkan sidang dan membatalkan semua keputusan yang sudah dibuat.

⁹ Dahana. *Indonesia Dalam Arus Sejarah Jilid 7*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2012, hlm. 413.

Konfrensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag pada 23 Agustus- 2 November 1949 juga membicarakan mengenai masalah Irian Barat.¹⁰ Dalam konfrensi ini, terjadi perdebatan antara delegasi Indonesia dan delegasi Belanda. Menurut Belanda, wilayah Irian Barat perlu mendapatkan status khusus, karena wilayah Irian Barat tidak memiliki hubungan ekonomi dengan wilayah-wilayah Indonesia. Menurut Belanda, wilayah Irian Barat harus berada di luar wilayah Republik Indonesia Serikat. Irian barat dianggap memiliki hubungan politik dengan Kerajaan Belanda, dan menurut delegasi Belanda juga mengatakan bahwa secara etnik dan kebudayaan Irian Barat bukan merupakan bagian dari Indonesia. Maka dari itu, tidak ada satu alasanpun untuk menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Namun menurut pemerintah Indonesia yang pada saat konfrensi tersebut diwakilkan oleh delegasinya, Irian Barat harus diserahkan kepada RIS. Karena pada waktu itu terjalin hubungan etnologi, ekonomi dan agama.

Konfrensi-konfrensi yang dilaksanakan dan membicarakan masalah Irian Barat tersebut pada akhirnya yang dihasilkan hanyalah jalan buntu. Akhirnya untuk mengatasi permasalahan Irian Barat tersebut ditetapkanlah suatu kompromi. Dalam kompromi tersebut ditetapkanlah *status quo* (pengawasan dan pemerintahan) Belanda di Irian Barat dapat dilakukan terus dengan keputusan bahwa dalam waktu sejak penyerahan kedaulatan kepada RIS masalah status politik Irian Barat akan ditentukan dengan cara perundingan-perundingan antara RIS dengan Belanda.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 414.

Namun dalam keputusan tersebut, masih dianggap bahwa masalah Irian Barat belum terselesaikan.

Setelah masa RIS berakhir dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Kabinet pertama dalam pemerintahan adalah Kabinet Natsir. Dalam kabinet Natsir, permasalahan Irian Barat dimasukkan ke dalam program kerjanya. Kemudian pada kabinet setelah Natsir, yaitu kabinet Sukiman, program kerjanya adalah menjalankan politik bebas aktif dan memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Selanjutnya pada kabinet Wilopo, memiliki beberapa program kerja antara lain pengembalian Irian Barat ke Indonesia. Kabinet-kabinet selanjutnya yaitu kabinet Ali Sastroamidjojo I, Burhanudin Harahap, Ali Sastroamidjojo II, dan Djuanda tetap mencantumkan masalah Irian Barat dalam program kerjanya.

Dalam konfrensi menteri-menteri Uni Indonesia-Belanda yang pertama kali diselenggarakan di Jakarta bulan Maret 1950, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Prof. Dr Soepomo beserta 10 anggotanya dan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Mr. J. H. Maarseveen masih tetap merundingkan permasalahan Irian Barat.¹¹ Dalam konfrensi itu sepakat dihasilkan keputusan bahwa akan dibentuk Komisi Gabungan yang bertugas mencari fakta tentang Irian Barat yang kemudian dilaporkan kepada Uni setelah tiga bulan. Hasil kerja komisi tersebut merupakan bahan perundingan untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Namun hasil laporan dari Komisi Gabungan tersebut memiliki tafsiran yang berbeda-beda. Pihak Indonesia

¹¹ *Ibid*, hlm. 416.

berpendapat bahwa Hak atas Irian Barat adalah milik Indonesia sepenuhnya, sedangkan dari pihak Belanda menyatakan bahwa kekuasaan Belanda atas Irian Barat merupakan kekuasaan kolonial. Atas hasil dari komisi tersebut kembali lagi tidak didapatkan sebuah keputusan dan penyelesaian atas masalah Irian Barat.

Perundingan-perundingan kembali dilaksanakan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan Irian Barat tersebut. Namun untuk menyelesaikan masalah Irian Barat tersebut secara damai belum mendapatkan sebuah hasil yang adil untuk kedua belah pihak. Masalah Irian Barat bukan hanya masalah hukum melainkan masalah politik antar kedua negara tersebut. Sehingga kedua belah pihak menganggap bahwa wilayah Irian Barat merupakan sebagian wilayahnya. Bagi Belanda permasalahan tersebut tidak mungkin dilakukan dengan cara kompromi.

Sementara status Irian Barat masih dalam sengketa, pemerintah Belanda melakukan tindakan sepihak untuk memperoleh hak atas wilayah Irian Barat tersebut. Tindakan itu dilakukan dengan cara mengubah UUD Belanda, yaitu dengan mengganti nama dari Nederlansch Indie menjadi Nederland Nieuw-Guinea. Setelah tindakan sepihak yang dilakukan Belanda tersebut, selanjutnya Belanda menolak untuk melakukan perundingan-perundingan maupun kompromi-kompromi dengan Indonesia.

Tindakan sepihak yang dilakukan oleh Belanda tersebut diprotes pemerintah Indonesia melalui wakilnya di PBB yaitu Mr. Laili Rusad. Pemeritah Indonesia menyatakan keberatan karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran, sebab wilayah Irian Barat masih dalam sengketa. Sementara wakil Belanda di PBB Mr.

Spits menolak tuduhan tersebut dengan alasan bahwa tindakan pemerintah Belanda tersebut sesuai dengan hukum ketatanegaraan Belanda.¹²

Peristiwa tersebut membuat hubungan kedua negara menjadi panas. Pemerintah Indonesia masih berupaya melakukan perundingan dengan Belanda. Pemerintah Indonesia mengirimkan nota politik untuk pemerintah Belanda namun pemerintah Belanda membalas nota tersebut dengan jawaban tidak akan melakukan perundingan apapun dengan Indonesia. Hal itu semakin membuat hubungan kedua belah pihak semakin tegang.

Sementara hubungan kedua belah pihak semakin memanas, pemerintah Belanda melakukan mobilisasi untuk pemudanya agar mendaftarkan diri pada dinas militer untuk Irian Barat. Tindakan tersebut mendapat reaksi dari kalangan politisi Indonesia baik dari dalam maupun luar parlemen. Para politisi mendesak untuk segera menyiapkan jawaban militer atas tindakan Belanda tersebut dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda secepatnya.¹³

Tindakan Belanda atas Irian Barat secara sepihak mengakibatkan pihak Indonesia tidak mau tinggal diam. Pada tahun 1957 dibentuklah Front Nasional Pembelaan Irian Barat untuk memperkuat perjuangan pembelaan Irian Barat. Front Nasional dibentuk untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda dan memasukkan Irian Barat menjadi wilayah NKRI. Selain pembentukan Front Nasional tersebut, dilakukan pula tindakan nasionalisasi semua perusahaan Belanda

¹² *Ibid.* hlm. 417.

¹³ *Ibid.*

yang ada di Indonesia. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda.

Semakin memanasnya hubungan kedua negara tersebut karena permasalahan perebutan wilayah Irian Barat mendapat perhatian dari dunia terutama dari PBB. Perundingan-perundingan yang dilakukan PBB dengan menyertakan kedua negara tersebut tidak kunjung mendapatkan hasil. Bahkan negara-negara barat khususnya negara-negara yang ada di Eropa tetap mendukung hak atas Irian Barat untuk Kerajaan Belanda. Sebaliknya dengan Indonesia yang mendapat dukungan dari negara-negara di benua Asia dan Afrika. Sementara Amerika dengan sepuluh negara lainnya memilih *abstain*. Namun dengan bersamanya perang dingin yang terjadi antara blok barat (Amerika) dan blok timur (Uni Soviet) berdampak dengan kelanjutan permasalahan Irian Barat. Amerika yang semula memilih untuk *abstain* namun secara diam-diam memihak dan mendukung Belanda untuk mendapatkan hak atas Irian Barat. Dengan dukungan yang terus mengalir dari Amerika untuk Belanda, maka permintaan akan perundingan mengenai Irian Barat di PBB selalu gagal. Selain itu pengaruh Amerika dalam PBB mengakibatkan tidak pernah didapatkan suara mayoritas dalam permasalahan Irian Barat. Dibalik dukungan Amerika terhadap Belanda terdapat keinginan Amerika untuk tetap menjaga keutuhan North Atlantic Treaty Organization (NATO) karena Belanda merupakan salah satu anggotanya.

Semenjak putusnya hubungan diplomatik kedua belah pihak antara Indonesia dan Belanda, pemerintah Indonesia melancarkan konfrontasi total untuk

membebaskan Irian Barat. Konfrontasi ekonomi dan dipakai dengan tetap menggunakan jalur diplomatik. Konfrontasi di bidang militer didukung dengan melakukan perjanjian antara pemerintah dengan Uni Soviet untuk pembelian senjata. Sementara itu Belanda juga meningkatkan kekuatan militernya dengan mengirimkan kapal induk Karel Doomen ke Irian Barat. Belanda juga membentuk Dewan Papua sebagai persiapan untuk pembentukan Negara Papua. Kemudian dalam sidang PBB September 1961 Belanda mengusulkan agar penduduk Irian Barat diberi hak untuk dapat menentukan nasib sendiri.

Pemerintah Indonesia merasa saluran diplomatik sudah tidak mungkin ditempuh untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Sehingga pemerintah Indonesia memilih untuk melakukan konfrontasi militer. Pada tanggal 19 Desember 1961, dalam rapat raksasa yang diadakan di Alun-alun Utara Yogyakarta, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora). Trikora berisi :

1. Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda di Irian Barat
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan tanah air dan bangsa.¹⁴

Trikora ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia guna berpartisipasi dalam membebaskan Irian Barat. Seluruh rakyat dan elemen pemerintahan pada waktu itu bersatu untuk melawan Belanda kembali. Dengan keluarnya Trikora oleh Presiden Soekarno, maka jalan militerlah yang ditempuh untuk membebaskan Irian Barat.

¹⁴ Awaloedin Djamin, *op.cit.*, hlm. 329.

Komando Trikora ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan operasi militer untuk Irian Barat. Untuk menyelenggarakan operasi-operasi guna membebaskan Irian Barat, maka dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dibawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto. Dalam strategi Komando itu akan dilakukan operasi bertahap sebagai berikut:

1. Tahap infiltrasi , memasukkan secara berangsur-angsur 10 kompi inti ABRI sampai akhir tahun 1962
2. Tahap eksploitasi, mengadakan rencana untuk melakukan serangan terbuka terhadap induk kekuatan musuh di Biak guna melumpuhkan musuh dan mengembalikan wilayah Irian Barat kedalam kekuasaan RI; ini diperkirakan mulai tahun 1963
3. Tahap konsolidasi, yaitu mengkonsolidir kekuatan RI di seluruh Irian Barat.¹⁵

Sementara itu Kepolisian Negara segera mengambil langkah-langkah untuk mendukung Trikora. Langkah-langkah itu diwujudkan dalam pembentukan staf yang disebut Staf Komando Pelaksana Pembebasan Irian Barat. Staf ini bertugas memberikan saran-saran kepada Menteri/ Kepala Staf Angkatan Kepolisian yang berkaitan dengan Trikora. Selain itu penempatan perwira Polisi ke dalam Komando Mandala untuk merencanakan pembentukan kesatuan dalam kepolisian dalam rangka operasi pembebasan Irian Barat. Selain itu kesatuan tempur disiapkan untuk membantu operasi tersebut bersama-sama dengan Angkatan Bersenjata lainnya.

¹⁵ Memet, Tanuwidjaja, *op.cit*, hlm. 138.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri/Kepala Kepolisian Negara No. Pol. 64/SK/MK/1961 tanggal 16 Desember 1961 dibentuklah Resimen Tim Pertempuran I (RTP I). Resimen ini terdiri dari gabungan kesatuan-kesatuan Brigade Mobiele seluruh Indonesia dan diresmikan pada tanggal 8 Februari 1962 bertempat di Asrama Brimob Yon 1232/ Kelapa Dua. Resimen ini kemudian dikenal dengan sebutan Resimen Pelopor. Kesatuan RTP I/Brimob ini berkekuatan 2.400 personel yang terdiri atas Markas Komando, empat Batalyon Senapan Brimob, satu Kompi Senjata Bantuan, dan satu Datasemen Telekomunikasi/ Perhubungan. RTP I/Brimob ini dipimpin oleh Komisaris Tk. I R. Soetrasno sebagai komandan dan Komisaris Tk. II Martoyo sebagai wakil komandan.¹⁶

Bersamaan dengan dibentuknya Komando Mandala, Komisariat Kepolisian Irian Barat telah dimasukkan ke dalam Komisariat Kepolisian Maluku. Komisariat Kepolisian Irian Barat hanya memiliki kurang lebih personel satu kompi yang dipersiapkan di pulau Gebe. Peleburan tersebut menghasilkan gabungan Komisariat Kepolisian Gaya Baru yang tergabung dalam G-5/Koti. Dalam Angkatan Kepolisian, selain Mobiele Brigade yang menjadi inti untuk operasi militer guna pembebasan Irian Barat juga disertakan Polisi Perairan dan Polisi Udara. Empat kapal patroli milik Polisi Perairan dan Udara dikirimkan dan dilengkapi dengan delapan buah motor tipe seaskif. Sehingga dalam pelaksanaan operasi tersebut, Kepolisian dapat bekerja sama dengan Angkatan Bersenjata lain untuk memenuhi tujuan yang akan dicapai yaitu membebaskan Irian Barat.

¹⁶ Awaloedin Djamin, *op.cit*, hlm. 330.

Salah satu operasi yang dilakukan Kepolisian dalam operasi Trikora adalah keikutsertaan Polri ke Rumbati. Operasi Rumbati didukung oleh penduduk setempat di ulau Gorom dengan menyediakan dan membuat perahu yang berukuran sedang dan terbuat dari pohon kenari. Perahu yang digunakan berjumlah dua buah dan dilengkapi dengan motor tempel. Pada tanggal 4 April 1962 pukul 15.00 diberangkatkan 18 anggota Pelopor Korps Brimob menuju Fak-Fak yang dipimpin oleh AIP I Hudaya Sumarya.¹⁷ Namun ditengah perjalanan, salah satu motor tempel rusak dan perahu akhirnya pecah sehingga perahu tenggelam namun personel yang berada di perahu tersebut dapat diselamatkan. Karena tenggelamnya salah satu perahu tersebut, maka rombongan kembali ke pangkalan Gorom yang memerlukan waktu dua hari dua malam.

Sesampainya di Gorom, perahu tersebut diperbaiki. Pada tanggal 13 Mei 1962 dilakukan percobaan kembali untuk mengirimkan anggota Pelopor ke Fak-Fak. Percobaan dilakukan dengan mengirimkan 20 anggota Pelopor Korps Brimob menggunakan sebuah perahu besar dengan layar dan dilengkapi dengan dua buah motor tempel. Perbekalan yang dibawa adalah satu karung sagu dan persenjataan organic AR 15. Aka tetapi kedatangan rombongan tersebut terlihat oleh dua kapal *destroyer* milik Belanda sebelum sampai ke daratan. Kedua kapal itu kemudian mengepung perahu milik rombongan yang dikirimkan oleh Pelopor Korps Brimob. Karena kekuatan yang tidak berimbang, rombongan yang beranggotakan Pelopor Korps Brimob tersebut tidak melawan tembakan-tembakan dengan menggunakan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 333.

tembakan AR 15 beserta granat ATS. Karena jika mereka melawan maka mereka akan dihancurkan mengingat jumlah mereka yang tidak sepadan. Akhirnya rombongan tersebut menyerah dan ditangkap dan ditawan oleh tentara Belanda. Sebelum mereka tertangkap, dokumen-dokumen penting dapat dibuang dan menutup jejak pasukan yang masih berada di Gorom.

Rombongan Pelopor Korps Brimob yang ditawan oleh Belanda tersebut semula ditempatkan di Sorong, kemudian dipindahkan ke Holandia (Jayapura) dan akhirnya ditempatkan di pulau Hundi bersama anggota pasukan RPKAD, pasukan Brawijaya, dan Pasukan Diponegoro yang telah tertangkap sebelumnya. Tak lama setelah penangkapan tersebut, radio Biak menyiarkan berita tertangkapnya Datasemen Pelopor oleh Belanda di perairan menuju Fak-fak. Berita tersebut telah sampai ke pasukan Pelopor lainnya yang masih berada di pangkalan Gorom. Mendengar berita tersebut, pasukan Pelopor Korps Brimob tersebut segera mempersiapkan pasukan untuk berangkat ke daratan Irian Barat untuk menyerang Belanda. Mereka menggunakan alat penyeberangan yang lebih baik dari sebelumnya. Semula pasukan tersebut akan menggunakan kapal Polairud tipe 900, namun kapal tersebut masih digunakan Komandan Mandala (Mayjen TNI Soeharto) sehingga pasukan tersebut terpaksa menggunakan *speedboat* tipe *fiberglass* milik Angkatan Darat karena waktu yang sangat mendesak.

Pada tanggal 7 Agustus pasukan Pelopor Korps Brimob yang berada di pangkalan Gorom diberangkatkan dari Gorom menuju Fak-fak. Pasukan terdiri dari 65 personel beserta sukarelawan dan dipimpin oleh Ajun. Inspektur Pol. Hudaya

Sumarya.¹⁸ Pasukan membawa perbekalan sagu, dua set alat komunikasi dan senjala AR 15 beserta granat ATS. sekitar tengah malam pasukan tersebut berhasil mendarat di daratan Irian Barat tepatnya di Jazirah Oning, Tanjung Fatagar, daerah Rumbati. Pasukan Detasemen Pelopor ini bergerak menaiki bukit dan memakan apa saja yang terdapat di wilayah itu karena sulitnya mencari makanan di daerah tersebut. Usaha tersebut berhasil dan pasukan Pelopor dapat menguasai keadaan, daerah, medan serta penduduk asli di daerah tersebut. Dalam perjalanan tersebut, pasukan pelopor bertemu dengan Wakil Raja Rumbati yang pro dengan Indonesia. Wakil Raja Rumbati bernama Mohammad Tahir menyarankan agar pasukan kembali ke hutan, sebab banyak tentara Indonesia yang mati karena serangan dari Belanda. Mohammad Tahir juga menyarankan jika pasuka Pelopor akan bergerak ke Fak-fak maka hendaknya melewati jalan dari Salakiti dan tidak dianjurkan melewati Rumbati karena akan memakan waktu yang lama. Wakil Raja Rumbati tersebut membantu pasukan dengan menyeiakan 6 perahu didaerah Tawar untuk mengangkut pasukan menuju Salakiti. Pasukan ini dibagi menjadi dua yaitu satu regu yang dipimpin oleh Haryanto tinggal di Salakiti, dan satu regu yang dipimpin oleh Hudaya Sumarya tetap tinggal di Tawar. Namun regu Haryanto diketahui oleh marinir Belanda dan kontak senjata terjadi diantara regu Haryanto dan marinir Belanda. Dua anggota Pelopor ditawan oleh Belanda yaitu Adnan dan Arif Hiba.

Sementara itu Belanda memanggil Wakil Raja Rumbati untuk dimintai pertanggungjawaban mengenai lolosnya pasukan Pelopor di wilayah Rumbati.

¹⁸Ibid, hlm. 335.

Wakil Raja Rumbati menyalahkan Belanda karena kurangnya pengawasan di bagian pantai. Belanda juga menanyakan senjata apa yang digunakan pasukan Pelopor kepada Wakil Raja Rumbati. Dari semua senjata yang diperlihatkan Belanda kepada Wakil Raja Rumbati, tidak ada satupun senjata yang sama. Hal itu terjadi karena senjata yang digunakan pasukan Pelopor adalah senjata AR 15 yang merupakan senjata paling modern waktu itu.

Pada perkembangan selanjutnya, komando pasukan Pelopor membuat surat kepada penduduk asli untuk disampaikan ke pos-pos milik Belanda di Patipi, Kokas, dan Fak-fak. Isi surat tersebut adalah tentara RI sudah mendarat di pulau Was dan menunggu kedatangan Belanda. Dua hari kemudian, pasukan Belanda menyerang di pulau Was dengan menggunakan dua buah kapal perang serta sebuah pesawat erang Neptune sehingga terjadi kontak senjata. Pasukan pelopor tidak ada yang tewas namun dalam kontak senjata tersebut satu set alat komunikasi milik pasukan Pelopor hancur.

Tanggal 15 Agustus 1962 pasukan Hudaya Sumarya meninggalkan Pulau Was menuju Bukit Tanjung Fatagar untuk bersama-sama dengan pasukan Pelopor lain yang dipimpin oleh Pranoto untuk menuju Fak-fak. Di tengah perjalanan mereka bertemu patrol Polisi Papua, namun tidak terjadi insiden apa-apa. Gerakan pasukan Hudaya Sumarya ternyata sudah diketahui oleh Belanda. Namun karena pada waktu itu hujan deras, sehingga jejak pasukan Hudaya sudah terhapus sehingga tidak dikenali oleh pasukan Belanda. Sementara itu, dalam perjalanan bertemu dengan pasukan Hudaya Sumarya, pasukan Pranoto bertemu dengan marinir Belanda.

Sehingga kontak senjata terjadi diantara pasukan Pranoto dengan marinir Belanda. Ditengah-tengah kontak senjata antara dua pasukan tersebut, pasukan Hudaya Sumarya tiba dan bertemu dengan pasukan Pranoto. Karena kekuatan pasukan Pelopor menjadi satu, maka pasukan Belanda dapat dipukul mundur. Pasukan Pelopor tidak ada yang gugur, sebaliknya pasukan Belanda menderita 8 orang tewas, 1 diantaranya Komandan kompinya yaitu Letnan Deveries¹⁹. Setelah pertempuran selesai, pasukan pelopor yang bersatu bersama-sama melanjutkan serangan gerilyanya menuju Fak-fak. Pada tanggal 17 Agustus 1962 pasukan Pelopor merayakan hari ulang tahun Kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih . AIP Hudaya Sumarya bersama anggotanya mengambil alih pos-pos Belanda yang berada di Rumbati. Rakyat menyambut kedatanganpasukan Pelopor dan bendera merah putihpun pada saat itu dapat dikibarkan di wilayah Rumbati.

Setelah kemenangan pasukan Pelopor di daerah Rumbati, beberapa hari kemudian datanglah kurir dari Belanda yang bernama De Boixs.²⁰ Kurir itu memberi kabar bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian antara Belanda dengan Indonesia. Kesepakatan akan dicapai dengan datangnya anggota *United Nations Temporary Executive Autority* (UNTEA). Sebelum UNTEA tiba di Irian Barat, pihak Belanda datang di Rumbati dengan menggunakan kapal *destroyer*. Pihak dari Belanda mengajak pihak dari Indonesia untuk mengadakan perundingan tanpa senjata dengan Residen Belanda di Fak-fak. Sementara itu AIP Hudaya Sumarya

¹⁹ *Ibid*, hlm. 337.

^ ²⁰ *Ibid*.

dinaikan jabatannya menjadi Inspektur Polisi Tingkat II berangkat ke Fak-fak untuk berunding dengan Belanda. Dalam perundingan tersebut Belanda meminta pasukan Indonesia untuk menurunkan bendera merah putih di wilayah Rumbati dan wilayah lain yang sudah dikuasai oleh pasukan Indonesia. Belanda mengatakan bahwa jika merah putih tetap berkibar, maka penduduk akan rebut. Namun Hudaya Sumarya menjawab akan terjadi keributan bagi rakyat jika merah putih diturunkan. Sehingga dengan tekad keras dan kuat Hudaya Sumasrya tidak akan menurunkan bendera merah putih di wilayah Rumbati.

Akhirnya persetujuan antara Indonesia dengan Belanda tercapai dan disahkan oleh Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB di New York pada bulan September 1962. Pasukan Belanda ditarik mundur dari Fak-fak kecuali para perwiranya. Kemudian datang personel *Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA), yaitu badan pemerintahan sementara PBB. Dalam hal ini Korps Brigade Mobil menugaskan sejumlah pasukan dan pejabat untuk dipekerjakan di UNTEA. Pasukan dan pejabat tersebut antara lain Komisaris Polisi Tk. IV E. Karamoy dan Komisaris Polisi Tk. I H. Schiff yang diberangkatkan ke Irian Barat pada bulan Oktober 1962. Pada bulan Januari 1963 diberangkatkan enam bintara pelatih Brigade Mobil, sedangkan satu kompi Pelopor Brigade Mobil mulai bertugas di Irian Barat pada bulan Februari 1963.²¹

Brigade Mobil mengatur langkah perlahan-lahan untuk mengatur strategi keamanan agar tidak terjadi bentrokan antara Brigade Mobil dan UNTEA serta Polisi

²¹ *Ibid*, hlm. 338.

buatan Belanda. Pada akhir Mei 1963 Kepala Kepolisian Karesidenan Kota Baru mengambil tindakan untuk melancarkan serah terima kekuasaan dari UNTEA ke pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya pasukan Datasemen Pelopor Brimob dengan pimpinan IP. II. Hudaya Sumarya mendirikan Sekolah Dasar di Rumbati, Sekolah Agama dan sekolah Dasar di Fak-fak dengan guru-gurunya diambil dari pasukan Hudaya Sumarya. Hudaya Sumarya mendirikan sekolah-sekolah tersebut guna meneruskan tugas territorial. Hudaya Sumarya merupakan Komandan Datasemen Pelopor sekaligus pimpinan Datasemen III, satu diantara empat datasemen Pelopor yang dipersiapkan ABRI untuk operasi Trikora.

Persetujuan Indonesia dengan Belanda dan penerjunan personel UNTEA merupakan akhir dari perselisihan dua negara tersebut. Tanggal 27 September 1962 adalah hari penyerahan tugas pembesar-pembesar tinggi Belanda kepada UNTEA seperti Gubernur, Kepala-kepala dinas, dan residen-residen. Dunia pada waktu itu menaruh minatnya dengan menyangka bahwa rakyat Irian Barat akan berontak melawan pemerintahan Republik Indonesia. Dunia mengira rakyat Irian seperti rakyat Kongo. Akan tetapi yang terjadi adalah ketenangan bagi rakyat Irian Barat. Rakyat Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia yang tidak suka dipisahkan.²²

Pada Mei 1963 UNTEA menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan kekuasaan Irian Barat untuk Indonesia merupakan bentuk kekalahan Belanda oleh Indonesia dalam bidang politik serta

²² Marzuki Arifin. *Irian Barat*. Kokonao: Arsip nasional Republik Indonesia.1962.

militer.²³ Setelah selesainya operasi Trikora, maka semua pasukan gerilyawan selesai menerima tugasnya dan dikirim kembali ke kesatuan masing-masing di seluruh Indonesia.

C. Operasi Dwikora

Setahun setelah penyerahan Irian Barat untuk Indonesia melalui *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA), Indonesia kembali mendapat masalah dengan negara lain yaitu tidak lain negara tetangganya sendiri Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia ini merupakan pengaruh dari terbentuknya Partai Komunis di Indonesia. Permasalahan berawal dari pembentukan Federasi Malaysia. Presiden Soekarno menganggap pembentukan federasi Malaysia merupakan proyek neokolonialisme Inggris dan dianggap akan membahayakan revolusi Indonesia. Sehingga Federasi Malaysia harus segera diakhiri bahkan dihancurkan.

Pada tanggal 27 Mei 1961, Perdana Menteri Federasi Malaya Tunku Abdul Rahman menyatakan gagasannya untuk mendirikan sebuah Federasi yang bertujuan menyatukan Malaya yang terdiri dari Malaya, Singapura, Serawak, Brunei dan Sabah (Kalimantan Utara) dan menjadi sebuah Negara Federasi Malaysia.²⁴ Maksud dari gagasan tersebut adalah untuk mempererat kerjasama antara negara-negara tersebut dalam bidang politik dan ekonomi. Federasi yang digagas Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman ini tidak termasuk federasi yang sudah merdeka pada tanggal

²³ *Ibid.*

²⁴ Dahana, *op.cit*, hlm. 427.

30 Agustus 1957 , karena wilayah tersebut masih merupakan wilayah kekuasaan Inggris. Rencana tersebut didukung oleh Inggris meskipun Inggris harus mengorbankan beberapa wilayahnya karena Inggris memiliki kepentingan yaitu dapat mempertahankan pangkalan militernya di Singapura dan mengamankan modalnya terutama di Kalimantan Utara.

Pada Agustus 1961, Komisaris Jenderal Inggris Lord Selkirk berkunjung ke Jakarta guna memberi tahu tentang rencana federasi tersebut. Menlu Subandrio dalam pernyataan di PBB tanggal 20 November 1961 mengatakan bahwa Indonesia tidak memiliki klaim atas Malaya, karena hubungan rasial yang begitu dekat. Setahun kemudian, dalam wawancara *The Sidney Morning Herald* pada September 1962 Menlu Subandrio menegaskan bahwa pembentukan Malaya diserahkan kepada rakyat di negara-negara yang akan digabungkan, karena Indonesia berharap penggabungan tersebut dapat memberikan kesejahteraan dan kemerdekaan bagi rakyat.²⁵

Para pemimpin Indonesia umumnya bersikap sama, yaitu tidak menentang atau menolak pembentukan federasi tersebut. Namun satu-satunya yang menolak pembentukan Federasi tersebut adalah PKI. PKI menganggap pembentukan Federasi Malaysia tersebut merupakan proyek buatan Inggris untuk melanjutkan tujuan neokolonialisme dan sebagai upaya untuk menekan rakyat dalam menentukan nasib sendiri. PKI menyatakan pembentukan federasi tersebut dikendalikan oleh imperialis. Itu sebabnya PKI sangat menolak pembentukan Federasi Malaysia.

²⁵ *Ibid*, hlm. 428.

Pada tanggal 9 Juli 1963 ditandatangilah persetujuan pembentukan Federasi Malaysia di London oleh Inggris, Malaya, Singapura, Sabah dan Sarawak. Namun rencana pembentukan Federasi tersebut tidak didukung oleh seluruh rakyat. Penolakan tersebut dilakukan oleh partai-partai di Malaya terutama partai sayap kiri atau *Malayan Communist Party*. Di Sarawak, *United People's Party* juga menolak pembentukan Federasi tersebut dan diajukan kepada PBB. Sedangkan di Singapura, barisan Sosialis dan *United People's Party* tidak mendukung masuknya Singapura dalam Federasi Malaysia. Di Brunei, Partai Rakyat yang dipimpin oleh Azahari Muhammad menolak adanya Federasi Malaysia.²⁶ Azahari Muhammad menginginkan pemerintahan sendiri bagi seluruh Kalimantan Utara. Hal itu mengakibatkan pemberontakan oleh rakyat Brunei. Pemberontakan tidak ditujukan untuk Sultan Brunei dan aparatnya melainkan ditujukan untuk Inggris. Oleh karena itu, Azahari dan rakyat Brunei mengharapkan bantuan dari Indonesia.

Keyakinan politik luar negeri Presiden Soekarno menyatakan penolakan terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Penolakan yang dinyatakan oleh Presiden Soekarno tersebut berdasarkan alasan bahwa pembentukan Federasi Malaysia merupakan kepentingan Inggris bukan kepentingan rakyat setempat. Perang kata-kata pun dimulai antara Jakarta dengan Kuala Lumpur yang berlangsung sejak April 1963, ketika Presiden Soekarno untuk pertama kalinya mengecam pembentukan Federasi Malaysia pada konfrensi wartawan Asia Afrika.

²⁶ *Ibid*, hlm. 429.

Sementara itu beberapa bulan sebelum terbentuknya Federasi Malaysia, hubungan antara Indonesia dengan Malaya mulai tegang. Filipina yang juga menolak pembentukan Federasi Malaysia karena klaimnya atas Sabah menjadi penengah antara Indonesia dengan Malaya. Untuk meredakan ketegangan tersebut, Filipina mengajak Indonesia dengan Malaya ke atas meja perundingan untuk membahas pembentukan Federasi Malaysia tersebut. Indonesia dan Malaya menerima prakarsa dari Filipina tersebut dengan dasar sebagai pengerat hubungan antar ketiga negara tersebut. Perundingan ini juga merupakan persiapan Konfrensi Tingkat Menteri Luar Negeri untuk Indonesia, Filipina, dan Malaya.

Sebelum Konfrensi Tingkat Menteri Luar Negeri dilaksanakan, ketika Presiden Soekarno berada di Tokyo bertemu dengan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman dan Presiden Filipina Macapagal. Dalam pembicaraan yang tidak resmi antara ketiga pemimpin tersebut dapat mengurangi ketegangan yang terjadi antara ketiga negara tersebut. Tanggal 7-11 Juni 1963 diadakanlah Konfrensi Tingkat Menteri Luar Negeri di Manila yang dihadiri oleh Menteri-menteri Luar Negeri ketiga negara tersebut.²⁷ KTT tersebut menghasilkan keputusan bahwa Indonesia dan Filipina tidak keberatan terhadap pembentukan Federasi Malaya namun pembentukan tersebut harus disetujui oleh rakyat yang ada di wilayah-wilayah yang disatukan. Akan tetapi setelah konfrensi itu dilaksanakan, Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman menandatangani pembentukan Federasi Malaysia di London tanpa meminta persetujuan dari rakyat di wilayah setempat. Namun dalam laporan yang

²⁷ *Ibid*, hlm. 430.

disampaikan kepada Sekjen PBB, Tunku Abdul Rahman menyatakan bahwa seluruh rakyat di wilayah yang akan dibentuk Federasi menyetujui pembentukan Feerasi Malaysia. Akan tetapi Indonesia menolak keabsahan pernyataan tersebut karena penyelidikan yang dilakukan oleh Indonesia dihalang-halangi oleh Inggris. Hal ini mengakibatkan ketegangan terjadi kembali terutama dengan Indonesia karena Malaya dianggap melanggar kesepakatan yang dicapai sebelumnya pada KTT Manila.

Tindakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaya Tunku Abdul Rahman memicu aksi demonstran masyarakat Indonesia didepan kantor Kedutan Besar Malaya dan kantor Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Hal yang sama juga terjadi di kantor Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur oleh demonstran pro Malaysia yang mengutuk aksi demonstran yang ada di Jakarta. Reaksi tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaya. Berdasarkan hal itu, kemudian Indonesia membantu perjuangan Azahari dengan mengirimkan sukarelawan bala tentara ke Kalimantan Utara. Pada tanggal 13 Mei 1964 Presiden Soekarno mengucapkan Komando yang dikenal dengan Dwi Komando Rakyat (Dwikora). Dwikora berisi “Perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan rakyat Malaya, Sabah, Serawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia”.²⁸ Komando tersebut diucapkan didepan apel besar sukarelawan dan pada saat itu Presiden Soekarno mengucapkan kata-kata

²⁸ Awaloedin Djamin, *op.cit*, hlm. 340.

“Ganyang Malaysia” yang menggetarkan seluruh Indonesia maupun negara lain yang mendengarnya.

Memanasnya konfrontasi dengan Malaysia memicu pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kekuatan militer Indonesia dengan cara mengkoordinasi satuan-satuan ABRI yang berada di daerah perbatasan. Koordinasi dibuat untuk mempersiapkan operasi-operasi yang akan dilakukan. Maka untuk menjamin pasukan-pasukan, dibuatlah suatu komando yang meliputi seluruh pasukan bersenjata dan merupakan suatu komando tugas. Komando tersebut disebut dengan Komando Siaga (KOGA). Komando ini bersifat gabungan dan meliputi wilayah Indonesia Bagian Barat. Komando Siaga dibentuk berdasarkan SK. Pres./PANGTI ABRI/KOTI No. 23/KOTI/1964 tanggal 16 Mei 1964.²⁹

Panglima Komando Siaga adalah Laksamana Madya Udara Omar Dhani dan dibantu oleh Wakil I Laksamana Muda Laut Muljadi dan Wakil II Brigdjen. TNI. A. Wiranatahkusumah. Panglima Komando Siaga membawahi unsur-unsur sebagai berikut.

1. Komponen Angkatan Darat
2. Komponen Angkatan Laut
3. Komponen Angkatan Udara
4. Komponen Angkatan Kepolisian

Keempat komponen tersebut dibantu oleh Staf Gabungan yang terdiri dari:

²⁹ Kusumah Hadiningrat. *Sedjarah Operasi-operasi Gabungan Dalam Rangka Dwikora*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI. 1971, hlm. 40.

1. Gabungan I (Intelejen)
2. Gabungan II (Operasi dan Latihan)
3. Gabungan III (Personalia)
4. Gabungan IV (Logistic)
5. Gabungan V (Territorial)
6. Gabungan VI (Komunikasi)³⁰

Seiring perkembangan dan pelaksanaan operasi Dwikora, maka dirasa perlu untuk menyempurnakan organisasi Komandi Siaga, maka dibentuklah Komando Mandala Siaga (KOLAGA) sebagai kelanjutan dari Komando Siaga. Pembentukan KOLAGA didasarkan pada Surat Keputusan Presiden No. 9/KOTI/1965.³¹ Komando ini bertugas merencanakan, mempersiapkan, mengembangkan, dan mengawasi operasi militer dalam rangka pelaksanaan Dwikora guna mempertahankan wilayah Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah barat.

Sebagai tindak lanjut atas dikumandangkannya Dwikora oleh Presiden Soekarno, maka Kepolisian Negara juga mempersiapkan diri untuk keikutsertaan dalam operasi Dwikora. Seluruh anggota Kepolisian telah menyatakan siap sedia untuk dikirimkan ke baris dpan sebagai anggota relawan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian No. Pol. 11/SK/MK/1964 dibentuklah satuan tugas dari Korps Brigade Mobil yang tergabung dalam Brigade

³⁰ *Ibid*, hlm. 42.

³¹ *Ibid*, hlm. 43.

V/Mandau.³² Gabungan satuan tugas tersebut terdiri dari kesatuan-kesatuan dari Sumatera Selatan, Maluku, dan Resimen Pelopor Korps Brigade Mobil. Pasukan ini dipimpin oleh I.P. I.N.A. Titalay dan ditempatkan di pulau Bintan/Tanjung Pinang.

Gerakan penyerangan dilakukan selama beberapa tahap. Pada tanggal 23 Februari 1965 diterjunkan pasukan yang merupakan dari gerakan penyerangan tahap pertama. Serangan ini terjadi di Pos Guntul dan menjatuhkan tiga korban luka-luka diantaranya Bripda Zainal, Bripda Wasih, dan Abribda Radiman. Kemudian pada tanggal 22 Maret 1965 dilakukan serangan pada tahap kedua. Serangan ini menerjunkan pleton khusus yang sedang mengadakan patroli penyelidikan ke daerah perbatasan, namun disana bertemu dengan pasukan lawan sehingga terjadi kontak senjata dan mengakibatkan hilangnya Bharada Soejono. Tanggal 31 Maret 1965 terjadi serangan di Pos Nanga Badau. Dalam serangan ini seorang pegawai sipil bernama Marsiti tewas karena tertembak. Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 1965 regu patroli pengamanan di sungai Antu terlibat perkelahian dengan pasukan Malaysia dan mengakibatkan dua orang anggota Kepolisian gugur yaitu Briptu Soemardjo dan Bripda Suta Djamaris. Sedangkan empat orang pasukan Malaysia tewas karena perkelahian tersebut. Pada tanggal 21 Juni 1965 team khusus intelejen mengadakan patroli di kepulauan Kapa Tujung dan terjadi kontak senjata dengan musuh sehingga menewaskan seorang anggota Kepolisian yaitu Pandapatan Hutaurok dan tujuh orang musuh tewas dalam kontak senjata tersebut. Kemudian pada tanggal 30 Juni 1965 patroli yang dilakukan di kampung Penyeruai juga terjadi

³² Memet Tanuwidjaja, *op.cit*, hlm. 147.

kontak senjata dengan musuh dan menewaskan empat orang anggota Kepolisian yaitu Briptu Wirdjadi, Bharada Muntono, Bharada Suspadi, dan seorang anggota Kepolisian yang hilang yaitu Bripu Sasagapu. Tada tanggal 6 Juli 1965 di kampung Baliyung terjadi kontak senjata dengan pasukan Malaysia. Kontak senjata itu menewaskan seorang anggota Kepolisian bernama Abrib Jansen Purba. Tanggal 6 Agustus 1965 serangan patroli musuh di Pos Lobing II menewaskan Bharada Utomo dan korban luka-luka Bripda Jatin. Sementara tujuh orang pasukan Malaysia gugur dalam kontak senjata ini. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 1965 serangan musuh di Pos Guntul menewaskan Bharatu P. Sulo dan korban luka-luka Abribda Soehardjo. Tanggal 13 Oktober 1965 kembali terjadi kontak senjata di Pos Lobing II. Dalam penyerangan ini dua orang anggota Kepolisian Bripda Sardjono da Bharada Soeprijanto mengalami luka-luka. Kontak senjata terakhir adalah tanggal 14 Oktober 1965 di Pos Muharai Panjang. Dalam kontak senjata ini tewas enam orang pasukan Kepolisian yaitu Bripda Sjamsudin, Bripda Rahamsum, Bripda Soemarno, Bharada Doelmoein, Bharada Kasmani, dan Bharada Djinawi. Selain itu terdapat dua orang anggota pasukan yang mengalami luka-luka diantaranya Bripda Bharuddin dan Bharada Ateng Djafar.³³

Sementara itu serangan-serangan tembakan dan pelanggaran-pelanggaran udara tidak disebutkan karena serangan dilakukan setiap hari. Tidak sedikit anggota Korps Kepolisian yang tewas dan menjadi tawanan dalam operasi Dwikora. Diujung akhirnya pertikaian antara Indonesia dengan Malaysia, pasukan-pasukan yang

³³ *Ibid*, hlm. 148.

dikirimkan untuk melaksanakan operasi Dwikora sedikit demi sedikit dipulangkan kembali ke satuan tugas mereka sebelumnya. Sementara itu Brigade V Mandau yang beranggotakan Korps Brigade Mobil Jawa Barat masih dikirimkan ke Kalimantan Utara sampai dengan persoalan Indonesia dengan Malaysia dapat diselesaikan menggunakan jalan damai. Akhirnya konflik ini berkurang dengan sendirinya karena adanya Gerakan 30 September di Indonesia.

D. Penumpasan G 30 S

Pada tanggal 30 September 1965 di ibukota Jakarta terjadi suatu percobaan kudeta yang mengacaukan tatanan pemerintahan Republik Indonesia. Kudeta tersebut dikenal dengan Gerakan 30 September. Gerakan 30 September (G30S) meletus ketika bangsa Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. G30S dianggap sebagai gerakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kudeta ini terjadi dianggap bertujuan untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain.

Dalam pertimbangan dan perkembangan permasalahan kudeta G30S yang begitu rumit, permasalahan G30S sampai saat ini belum bisa dipastikan kebenaran sepenuhnya meskipun bukti-bukti terkait banyak ditemukan. Hal yang dapat disepakati dalam permasalahan ini adalah bukan hanya ada satu dalang dalam kudeta tersebut. Selain itu dengan meletusnya kudeta yang dikenal dengan G30S bukan hanya merugikan negara, namun juga menewaskan banyak korban. Sehingga

dalam pembahasan untuk kudeta tersebut, banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan secara hati-hati agar tidak membuat keputusan sepihak.³⁴

Tanggal 30 September malam hari, satu batalyon pengawal istana yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung yang sebelumnya merupakan Divisi Diponegoro, ditambah dengan satu batalyon dari Divisi Diponegoro, satu batalyon dari Divisi Brawijaya, dan orang-orang sipil yang merupakan pemuda rakyat PKI bersama-sama meninggalkan bandara Halim. Mereka berangkat untuk menculik pejabat-pejabat tingkat atas Angkatan Darat. Dalam penculikan ini, para pelaku kudeta menggunakan alasan untuk menyelamatkan Presiden dari Dewan Jenderal yang disangka para pelaku gerakan merupakan Dewan Jenderal yang akan memberontak kepada Presiden Soekarno. Pejabat-pejabat tinggi Angkatan Darat tersebut adalah sebagai berikut, Menteri/Pangad Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Soeprapto, Brigadir Jenderal D.I. Pandjaitan, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jendral Soetojo, Kapten Piere Tendean, serta Jenderal A.H. Nasution. Pemimpin-pemimpin dari gerakan ini adalah Kolonel Untung dari Resimen Cakrabirawa, Brigadir Jenderal Supardjo dari Divisi Siliwangi dan kepala intelejen Divisi Diponegoro, Omad Dhani yang memberikan pangkalan udara Halim, Kolonel Sunardi dari Angkatan Laut, Letnan Kolonel Heru Atmodjo dari Angkatan Udara, AKBP Anwas dari Polri, serta beberapa anggota PKI yang dipimpin oleh D.N. Aidit.

³⁴ Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2007, Hlm. 427.

Kudeta ini merupakan kudeta yang dilakukan dengan kurangnya persiapan karena ketidakcakapan para pelaku. Jenderal Ahmad Yani dan dua orang Jenderal lainnya dibunuh dirumah mereka karena melawan ketika akan ditangkap, sementara Jenderal A.H. Nasution berhasil melepas diri sehingga ajukan dari Jenderal A.H. Nasution yaitu Kapten Pieter Tendean yang diculik. Namun putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution yang masih berumur lima tahun tertembak dan tewas setelah beberapa hari. Sementara ketiga Jenderal lainnya dan Kapten Pieter Tendean dapat diculik dan dibawa ke Halim. Di lokasi penculikan, semua tawanan yang merupakan Jenderal-jenderal tinggi Angkatan Darat disiksa dan dibunuh dengan kejam. Gerwani dan Pemuda Rakyat PKI ikut ambil bagian dalam pembunuhan kejam tersebut. Kemudian ketujuh mayat Jenderal-jenderal tersebut dibuang ke dalam sumur yang sudah tidak terpakai lagi.

Selain para perwira TNI yang menjadi korban, terdapat pula seorang anggota Brimob yang tewas yaitu Brigadir Poisi Karel Satsuit Tubun. Ketika dini hari, Satsuit Tubun sedang berjaga di rumah kediaman Waperdam III dr. Leimena yang berada disamping rumah kediaman Jenderal A.H. Nasution. Dalam upaya mempermudah penculikan kerumah A.H. Nasution, gerombolan penculik melumpuhkan penjagaan terlebih dahulu di rumah dr. Lemeina. Mereka mendapat perlakuan dari Satsuit Tubun bahkan Satsuit Tubun berhasil menembak salah seorang gerombolan namun pada akhirnya Satsut Tubun tewas.

Penculikan terhadap Brigjen D. I. Pandjaitan juga melibatkan seorang anggota polisi yang menjadi saksi pada Gerakan penculikan tersebut. Anggota polisi

bernama Aiptu Soekitman sedang bertugas menjaga pos di Kebayoran Baru. Saat penculian di rumah D.I. Pandjaitan, Soekitman mendengar suara tembakan. Soekitman berniat mencari tahu apa yang terjadi di rumah D. I. Pandjaitan. Dengan menggunakan sepeda dan membawa senjata, Soekitman menuju rumah D. I. Pandjaitan. Namun sesampainya disana, Soekitman ikut diculik dan dibawa ke lubang buaya bersama dengan jenazah D. I. Pandjaitan. Di lokasi lubang buaya, Soekitman bisa meloloskan diri dari gerombolan karena gerombolan penculik sedang terfokuskan pada Jenderal-jenderal yang masih hidup. Disanalah Soekitman melihat para jenderal dan perwira TNI lainnya disiksa dan akhirnya dibunuh dengan kejam. Soekitman dapat melarian diri dan ditemukan oleh prajurit Resimen Pertempuran Koordinator Angkatan Darat (RPKAD) dibawah pimpinan Kol. Inf. Sarwo Edy Wibowo yang kemudian Soekitman dihadapkan pada Pangkostrad untuk dimintai informasi tentang G30S. Pada akhirnya Soekitman menjadi petunjuk jalan yang dicari yaitu sebuah sumur tua di kampung lubang buaya di sekitar wilayah Halim Perdana Kusuma dimana tempat penyiksaan dan jenazah para perwira TNI ditemukan.

Melalui Radio Republik Indonesia (RRI) yang sudah dikuasai oleh para pemberontak, Kolonel Untung mengeluarkan pengumuman bahwa telah dilakukan sebuah Gerakan militer yang disebut Gerakan 30 September untuk melindungi Presiden Soekarno dari Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Maka dari itu para pemberontak membentuk Dewan Revolusi sebagai sumber kekuatan negara. Dewan Revolusi dipimpin oleh Kolonel Untung

dan pada saat diumumkannya pembentukan Dewan Revolusi, Menpangak Kepolisian Negara disebut juga sebagai anggota dari Dewan Revolusi. Akan tetapi penyebutan nama-nama anggota Dewan Revolusi oleh Kolonel Untung sebagian besar tanpa diketahui oleh orang yang bersangkutan.

Sementara itu pada tanggal 1 Oktober 1965, Menpangak Soetjipto Joedodiharjo sedang berada di Sukabumi untuk peresmian pembukaan Akademi Angkatan Kepolisian. Setelah mendengar berita tentang terjadinya G30S, maka Menpangak segera pergi ke Jakarta guna untuk mengambil sikap dan meluruskan pengumuman yang telah tersebar ke seluruh penjuru Indonesia bahwa Menpangak tidak terlibat dalam Dewan Revolusi.³⁵ Kemudian Menpangak Soetjipto Joedodihardjo mengarahkan seluruh pasukan Kepolisian di seluruh Indonesia untuk bersatu padu melawan G30S dibawah komando yang diberikan oleh Mayor Jenderal Soeharto. Dengan arahan yang diberikan oleh Menpangak, maka Angkatan Kepolisian yang tergabung dalam ABRI akan menerima segala tugas yang diberikan dari pimpinan Operasi bersama-sama dengan Angkatan lainnya yaitu AD, AL, dan AK.

Di daerah-daerah di Jawa Tengah, Kepolisian membantu TNI dalam Operasi penumpasan Gerakan 30 September dengan PKI sebagai pelaku utamanya. Di Surakarta pada tanggal 2 Oktober 1965, Kepolisian Surakarta menerima undangan dari Dewan Revolusi untuk bergabung dan membentuk Dewan Revolusi daerah Surakarta. Namun surat itu ditolak oleh komandan Kepolisian setempat karena

³⁵ Awaloedin Djamin, *op.cit*, hlm. 348.

komandan Kepolisian sudah mengetahui adanya hal yang tidak baik. Kepolisian memantau adanya pertemuan para pendukung Dewan Revolusi yaitu Walikota Surakarta, Komandan Lanud Panasan dan Pembantu Gubernur untuk Surakarta dengan D.N. Aidit di Loji Gandrung.³⁶ Setelah itu keamanan dan patrol-patroli diperketat di Surakarta dengan pasukan Brimob Mnahan dan Kompi Diklat Tawangmangu. Sementara itu kantor-kantor Polisi digunakan sebagai tempat pusat komando pemerintahan sampai keadaan dapat dipulihkan.

Tanggal 21 Oktober 1965 di stasiun Balapan terjadi pemogokan Serikat Buruh Kereta Api. Namun pimpinan Kepolisian Surakarta KP. Drs. Sarwono dapat mengatasi agar pemogokan tidak meluas. Sementara itu sambil menunggu pasukan RPKAD yang masih berada di Magelang, terjadi pembunuhan terhadap sembilan pemuda yang dilakukan oleh PKI. Dalam kasus pembunuhan tersebut, Kepolisian mengejar dan menangkap para pelaku pembunuhan tersebut. Mereka diamankan dibalai kota oleh RPKAD dan selanjutnya diproses secara hukum. Dalam perkembangan penyelidikan Kepolisian, ditemukan dokumen-dokumen PKI yang melibatkan Waliota Surakarta Utomo Ramelan terlibat dalam PKI. Berdasarkan keterlibatan Walikota tersebut akhirnya Walikota dapat ditangkap dan diberi hukuman.

Tanggal 1 Oktober 1965 di desa Karanggeneng, Boyolali PKI membentuk Dewan Revolusi yang dihadiri oleh tokoh-tokoh PKI yaitu Lukman, Nyoto, Suyono Atmo, Bupati Boyolali Suali, dan Kolonel Sakirman. Dalam pertemuan itu mereka

³⁶ *Ibid*, hlm. 350.

merempersiapkan serangan ke kota Boyolali dengan melakukan penculikan.³⁷ Serangan tersebut dapat digagalkan oleh ABRI dan masyarakat namun sebelum serangan itu dilakukan, sudah ada 32 orang yang diculik dan sebagian dibunuh. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 1965 kepolisian dapat menggagalkan serangan PKI ke asrama Kepolisian di Sunggingan dan menangkap 62 orang PKI beserta Bupati Boyolali, Suali. Selain itu Kepolisian setempat dapat merampas 52 pucuk senjata berat dan ringan serta dua buah granat tangan. Dalam pengejarannya, polisi juga menangkap eks. Letko Usman, eks. Kolonel Sakirman, eks. Mayor Raharjo, eks. Kapten Sukmo, eks. Mayor Maryono, eks. Peltu Sukijan, Sudiyono eks. Kepala Kantor Otonom Boyolali, Tukul dan Slamen yang merupakan tokoh PKI.³⁸

Sementara itu di Sukoharjo, polisi bersama ABRI yang merupakan pasukan gabungan untuk melaksanakan tugas Operasi Penumpasan G 30 S melakukan penyelidikan terhadap orang-orang PKI. Tanggal 27 Oktober 1965 atas petunjuk dari Kepolisian, RPKAD dapat menangkap 16 orang anggota Kodim 0762 Sukoharjo. Pada saat yang sama polisi menangkap delapan orang PKI pelarian dari Wonogiri. Di Tawangsari polisi dapat menangkap tiga PKI pelarian dari Klaten. Kemudian ada tanggal 1 November 1965 polisi menangkap 125 simpatisan PKI untuk diproses secara hukum.³⁹

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid*, hlm. 351.

³⁹ *Ibid.*

Di daerah Klaten, PKI memiliki kekuatan besar. PKI berencana mengambil alih dan merebut senjata milik Komando Pendidikan 1 F5 di Wedi. Dalam lembaga pendidikan tersebut terdapat senjata yang dapat digunakan untuk dua batalyon. Apabila PKI dapat mengambil alih Komando Pendidikan F5 tersebut, maka kota Klaten dapat dihancurkan. Namun rencana PKI tersebut berhasil diketahui oleh Kepolisian Resort 953 Klaten dibawah pimpinan Danres Ahmad Ismadi dan sebelum PKI melakukan aksinya, Kepolisian berhasil menangkap beberapa oknum PKI yang merencanakan aksi tersebut. Selain rencana mengambil alih F5, PKI juga merencanakan gerakan kantong gombyok yang bertujuan merusak dan menghancurkan kota Klaten, namun Kepolisian Klaten dan rakyat yang anti PKI dapat menggagalkan rencana tersebut sehingga situasi Klaten dapat kembali kondusif.

E. Tugas Melindungi Presiden

Peran Kepolisian Negara selain dalam upaya kemananan dalam negeri Kepolisian juga merupakan kekuatan tersendiri bagi Presiden. Masa demokrasi terpimpin dikenal dengan keotoriteran sikap tunggal kekuasaan dari Presiden Soekarno. Dalam melindungi kekuasaan Presiden Soekarno, salah satu upaya Presiden Soekarno adalah memperkuat kekuatan militer terutama Angkatan Darat untuk menjaga kekuasaan tunggalnya. Dalam hal ini, Kepolisian yang tergabung dalam ABRI memiliki peran yang sangat terlihat dalam upaya melindungi Presiden

Soekarno dari kejadian penyerangan bahkan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno.

Selama masa periode Demokrasi Terpimpin, terjadi beberapa kali percobaan penyerangan dan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Namun karena kecakapan dan pengalaman yang diperoleh oleh anggota Kepolisian Negara terutama Brigade Mobil, percobaan pembunuhan tersebut dapat digagalkan. Akan tetapi ada beberapa anggota Brimob yang bertugas mengawal dan menjaga Presiden terkena luka-luka. Percobaan penyerangan dan pembunuhan terhadap Presiden terjadi beberapa kali dan berada di tempat yang berbeda-beda.

Percobaan pembunuhan yang pertama dilakukan oleh Letnan Muda Udara Alexander Maukar pada tanggal 9 Maret 1960.⁴⁰ Dengan menggunakan pesawat jet, Alexander Maukar menembaki Istana Merdeka. Dalam aksi percobaan pembunuhan ini, Presiden dapat diselamatkan namun seorang anggota Kepolisian AIP. Moh Anwar menderita luka-luka.

Percobaan pembunuhan yang kedua dilakukan di Istana Negara pada tanggal 14 Mei 1962 ketika Presiden Soekarno sedang menjalankan shalat Idul Adha. Seorang pelaku percobaan pembunuhan dapat menyelinap dan membaur bersama dengan undangan dan jamaah. Secara tiba-tiba pelaku tersebut menodongkan senjata jenis FN ke arah Presiden Soekarno. Berkat reaksi yang cepat dari AIP Soedjrajat dan Brigadir Polisi Soesilo yang menjadikan diri mereka sebagai tameng untuk Presiden Soekarno, Presiden Soekarno dapat diselamatkan. Namun kedua anggota

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 341.

polisi tersebut mengalami luka-luka di dada dan di leher karena melindungi Presiden. Dengan usaha percobaan pembunuhan tersebut pelaku ditindak sesuai hukuman dan kedua anggota polisi tersebut dapat terselamatkan.

Selain percobaan pembunuhan di Istana Negara ketika shalat Idul Adha, percobaan pembunuhan terjadi di Makasar tanggal 7 Januari 1962.⁴¹ Peristiwa terjadi ketika Presiden Soekarno beserta Menteri Pertama Djuanda melakukan kunjungan ke Makasar. Ketika perjalanan dari Lapangan Terbang Mandai menuju Makasar, rombongan Presiden diserang oleh sekelompok orang yang melemparkan granat tangan. Rombongan Presiden tersebut dilempari granat ketika melintasi Jalan Cendrawasih sehingga peristiwa tersebut dikenal dengan Peristiwa “Cendrawasih”. Lemparan granat tangan tidak mengenai sasaran namun mengakibatkan korban rakyat yang tidak bersalah. Meskipun mobil Presiden dan Perdana Menteri Djuanda mengalami kerusakan, Presiden dan Perdana Menteri dapat diselamatkan dan tetap melakukan pidato di tempat yang sudah ditetapkan. Pengawalan ini dilakukan oleh Brimob Makasar dengan komandan Brimob Daryono yang ikut dalam pengawalan Presiden tersebut. setelah dilakukan penyelidikan oleh Intelejen Kepolisian, ditemukan bukti bahwa gerombolan yang menyerang Presiden tersebut adalah kelompok yang menamakan diri Resimen Pertempuran Koordinator Angkatan Darat Revolusioner (RPKAD REV) Peristiwa Cendrawasih berdampak dalam bidang politik karena dalam peristiwa ini, sejumlah tokoh ditangkap dengan tuduhan

⁴¹ *Ibid.*

konspirasi untuk pembunuhan Presiden Soekarno. Tokoh-tokoh uang ditangkap antara lain Sutan Sjahrir dan Anak Agung Gde Agung.